

## TAJUK RENCANA

### Solusi Sampah Harus Komprehensif

**PERSOALAN** sampah di Yogya kembali mencuat dan viral di media sosial menyusul sidak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq ke depo sampah Mandala Krida beberapa hari lalu. Hanif geram dan marah-marah melihat tumpukan sampah yang ada di depo tersebut. Dengan lantangnya Hanif akan menurunkan tim ke Yogya dan memproses hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tumpukan sampah yang dinilainya mencemari lingkungan. Point penting lainnya, Hanif menuding Pemkot Yogya tidak becus mengurus sampah.

Momen Hanif marah-marah melihat tumpukan sampah di Depo Mandala Krida menjadi viral di media sosial. Media mainstream pun ikut mengangkat isu tersebut dalam rubriknya. Kita tak perlu emosional merespons pernyataan Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq. Wajar saja bila ia geram lantaran baru sekali ini melihat tumpukan sampah di Depo Mandala Krida. Wajar pula karena depo tersebut merupakan tempat transit pengangkutan sampah untuk dibawa ke tempat lain guna diolah lebih lanjut. Pemandangan serupa sebenarnya tak jauh berbeda di depo lainnya.

Tentu ini bukan sebagai pembenaran atas menumpuknya sampah di Depo Mandala Krida yang notabene menebar bau tak sedap. Apalagi, di depan depo adalah kawasan kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat. Kita mengakui bahwa Pemkot Yogya cukup kewalahan mengatasi sampah yang kapasitasnya mencapai 200 ton perhari, sehingga belum semuanya berhasil dikelola. Meski begitu, Pemkot terus melakukan berbagai upaya mengatasi sampah, antara lain dengan menggandeng pihak swasta.

Kita yakin Hanif belum mengetahui dan memahami persoalan

sampah di Yogya secara komprehensif, sehingga responsnya sangat emosional ketika melihat sampah yang menumpuk di Depo Mandala Krida. Respons Hanif yang hendak menindak secara hukum pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan sampah di Yogya, terkesan menyederhanakan masalah. Masalah sampah di Yogya bukan sekadar masalah hukum, tapi banyak aspek yang terkait, mulai dari ketersediaan lahan, peralatan pengolahan hingga budaya masyarakat. Kita harus mengakui, keterbatasan lahan di kota dan minimnya peralatan pengolahan menjadi kendala utama.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga tak pernah mengucurkan bantuan untuk pengelolaan sampah di Yogya, sehingga Pemkot masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkenaan itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah memanggil Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto dan Sekda Kota Yogya Aman Yuridijaya menyusul insiden Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq yang marah-marah saat sidak di Depo Sampah Mandala Krida beberapa hari lalu. Gubernur meminta mereka untuk memberi klarifikasi ke Menteri LHK tentang masalah yang sebenarnya terjadi (KR 20/11).

Kalau perlu, Pj Walikota dan Sekda datang ke Jakarta untuk memberi penjelasan langsung kepada Menteri LHK agar tidak salah paham. Kita mendukung upaya itu, karena persoalan sampah di Yogya tak sesederhana yang disampaikan Menteri LHK. Bahwa upaya membenahi sampah di Yogya sedang berproses, apalagi dalam waktu dekat ini segera dipasang insinerator baru di TPA Piyungan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah secara bertahap. □ - d

## Berebut 'Endorsement' Politik

**SECARA** harfiah, *endorsement* adalah strategi pemasaran yang melibatkan seseorang dengan pengaruh publik yang kuat untuk mempromosikan suatu produk. Sehingga, titik tekan dari *endorsement* adalah pengaruh seseorang yang kuat dalam melakukan promosi. Pengertian ini jika dihubungkan dengan konteks politik, maka *endorsement* erat kaitannya berebut atensi atas sosok yang memiliki suara banyak. Maka, bisa dikatakan bahwa *endorsement* politik adalah soal bagaimana memperoleh ceruk suara besar untuk memenangkan suatu kompetisi melalui dukungan sosok aktor politik.

Dasar pengertian ini mewarnai konteks Pilkada yang akan kita alami. Harus diakui bahwa peta elektoral Pilkada serentak 2024 tidak bisa dilepaskan dari konteks Pilpres 2024. Hal itu dapat terlihat dari bagaimana Koalisi Indonesia Maju (KIM) nyatanya juga bergerilya di dalam kontestasi Pilkada. Terakhir, presiden terpilih memberikan dukungan secara terang-terangan di dalam sebuah video terhadap satu pasang calon pemimpin di Jawa Tengah. Hal ini senada dengan peristiwa di mana KIM Plus yang mendukung calon yang berlawanan dengan partai-partai koalisinya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa *endorsement* seseorang yang lebih terkenal menjadi cara calon pemimpin lain untuk mendongkrak elektabilitas. Misalnya saja, kita sudah mahfum dengan sebutan "berebut Jokowi", yang artinya tidak hanya soal bagaimana merebut simpati Jokowi namun juga merangkul lumbung suaranya. Tidak heran kemudian, Pilkada ramai dengan pertanyaan-pertanyaan liar seperti siapa calon yang didukung Jokowi atau orang-orangnya, berapa jumlah dananya, dan siapa operatornya. Disadari atau tidak, trend ini memperlihatkan suatu hal.

Peristiwa itu kian menguatkan kesan bahwa kekuatan *brand* sosok menjadi lebih diperhitungkan ketimbang partai politik. Sesuatu yang sebenarnya sudah terlihat sejak Pilpres 2024 terjadi dan semakin dipertebal pada Pilkada serentak 2024. Pergerakan ini menyebabkan demokrasi Indonesia tidak lagi bergerak pada tataran ideologis, melainkan pragmatis. Lantas,

### Satria Aji Imawan

apakah *endorsement* di dalam politik adalah merupakan dosa besar?

*Endorsement* sebenarnya banyak diadaptasi dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Sudah lazim tentunya ketika suatu produk barang dipromosikan oleh orang yang terkenal dan digandrungi publik, maka produk tersebut diharapkan dapat dibeli oleh banyak orang.



KR-JOKO SANTOSO

Dengan prinsip ini, jika diletakkan pada soal politik, maka produk bukanlah sebuah barang namun manusia yang kemudian tujuannya adalah dipilih. Sehingga, *endorsement* bukanlah sebuah kesalahan besar, melainkan justru konsep *endorsement* di dalam politik harus dilakukan secara hati-hati.

Kewaspadaan ini masuk akal mengingat arti transaksional antara ekonomi dan politik berbeda. Jika ekonomi berbasis dari keuntungan pribadi sehingga dapat berganti dengan mudah dan cenderung memiliki efek jangka pendek, maka politik mempunyai kutub yang berbeda. Secara ekonomi, apabila produk ekonomi yang memperoleh *endorsement* dirasa kurang, maka orang dapat dengan mudah berganti produk. Perilaku berganti produk ini tidaklah berdampak luas. Hal ini berbeda tatkala prinsip yang sama diterapkan di dalam politik, misalnya ketika salah memilih calon yang memperoleh *endorsement*, maka publik harus menunggu lima tahun untuk kemudian membenahinya. Penjelasan ini

membuat *endorsement* politik memiliki efek yang lebih panjang ketimbang ekonomi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tantangan meletakkan *endorsement* politik kepada hal-hal yang bersifat substansial dan berkelanjutan penting untuk dirumuskan. Memandang *endorsement* antara ekonomi dan politik perlu dilakukan secara berbeda, baik rumusan, pelaksanaan maupun pemahamannya. Jika *endorsement* ekonomi hanya ditempatkan pada hal-hal yang pragmatis (keuntungan), maka *endorsement* politik seharusnya diletakkan juga pada hal-hal yang lebih ideologis (tujuan-tujuan pembangunan bangsa ke depan). Sehingga, ini bukan hanya soal menang kalah di dalam kontestasi Pilkada. Ini soal bagaimana *endorsement* politik berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Lalu, bagaimana menjamkannya?

Tentu saja pihak yang melakukan *endorsement* harus meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam koridor ini, para pemberi *endorse* harus mengedepankan sikap negarawan ketimbang begawan. Seorang negarawan sejatinya menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Karena itu, seorang negarawan pemberi *endorse* harus siap berpindah haluan ketika calon yang didukung tidak sejalan dengan agenda bangsa. Sikap demikian akan mendobrak stigma negatif atas frasa *endorsement* politik dan menggantinya dengan kacamata yang lebih positif. **■-d**

**\*)Satria Aji Imawan, Dosen Departemen Administrasi Publik di FISIP UNDIP dan Direktur Operasional di Kolaborasi Strategis (KOLASSE) Indonesia.**

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.

Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirnon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Direktur Litbang, Pengawasan & Bismis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE

**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Wijono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkr23@yahoo.com, iklanlkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00/ baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -

- W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Jalan Keluar Pemilu 'Ribet'

### Atmaja Wijaya

**MENJELANG** Pilkada serentak 2024, salah satu yang perlu diperhatikan ialah kesiapan penyelenggara. Jangan sampai ajang pesta demokrasi itu berakhir dengan riuh kebanggaan oligarki semata. Sementara penyelenggara dan rakyat hanya mendapat duka dan malapetaka. Masih segar di ingatan kita tidak sedikit petugas penyelenggara yang menjadi korban.

### Korban Nyawa Pemilu

Berdasar catatan KPU RI, pada Pemilu Serentak 2019, sebanyak 894 petugas Pemilu meninggal dunia, dari PPK, PPS, hingga KPPS dan 5.175 petugas Pemilu mengalami sakit. Sementara itu, pada Pemilu serentak 2024 kemarin, sebanyak 181 petugas Pemilu 2024 meninggal dunia, terdiri 6 anggota PPK, 23 anggota PPS, 152 anggota KPPS. Sedang yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.

Hal ini tentu sangatlah tragis, sebab satu nyawa warga negara yang terenggut melalui pemilu tidak bisa dibayar dengan alasan apapun. Kalau kita kalkulasikan, satu kursi wakil rakyat (DPR RI) yang duduk di Senayan pada 2019 ditukar dengan 1,5 nyawa petugas penyelenggara saat itu. Kendati korban meninggal dunia pada pemilu serentak 2024 menurun 713 dibanding tahun 2019, hal itu belumlah cukup untuk mengatakan bahwa sistem dan model Pemilu serentak yang kita terapkan berjalan efektif dan efisien. Terlebih melihat angka petugas penyelenggara yang mengalami sakit masih sangat tinggi, yaitu hanya menurun 405, dari 5.175 pada 2019 menjadi 4.770 pada 2024. Hal ini terjadi lantaran beban kerja besar yang diberikan kepada petugas penyelenggara Pemilu dalam satu waktu.

### Model Pemilu Ribet

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No 55/PUU-XVII/2019 memberi rekomendasi 6 model Pemilu serentak kepada pembentuk UU, yaitu DPR dan Presiden. Namun, sejauh ini model Pemilu serentak yang dipilih oleh DPR ialah model pertama dengan memilih langsung DPR, DPD, Presiden hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus. Fakta di la-

pangan menunjukkan bahwa dengan model ini terkesan *ribet* di samping memberi beban kerja yang besar kepada penyelenggara Pemilu dalam satu waktu. Di sisi lain rakyat yang disuguhkan 5 lembar kertas suara sekaligus dengan masing-masing lembar suara (kecuali Capres dan Cawapres) berisi banyaknya daftar nama caleg dari partai politik peserta Pemilu membuat rakyat sangat kesulitan dalam menentukan pilihan.

Contohnya, satu lembar suara untuk DPR RI dengan 24 partai politik pengusung bisa berisi 216 daftar nama caleg. Dengan masing-masing partai berisi daftar 9 nama caleg. Belum lagi daftar nama caleg di lembar suara untuk DPRD Provinsi dan Kab/Kota. Dengan model ini, waktu yang dihabiskan tidak sebentar, sementara masing-masing TPS hanya menyediakan 3-5 bilik suara. Tak heran jika hampir semua petugas KPPS di setiap TPS bekerja sampai larut malam bahkan hingga pagi hari. Beban kerja yang berat inilah yang membuat petugas penyelenggara Pemilu dari PPK, PPS, hingga KPPS mengalami sakit bahkan tak sedikit meninggal dunia.

### Jalan Keluar Pemilu 'Ribet'

Pemilu serentak tiga skala yang menjadi model terakhir tawaran MK terkait 6 model Pemilu serentak dalam kurun putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 bisa menjadi alternatif dari Pemilu *ribet* seperti sekarang. Lantas bagaimana model Pemilu serentak tiga skala?

Menurut penulis, Pemilu serentak tiga skala bisa dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, di mana awal tahun dilaksanakan Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Kemudian pemilu serentak lokal atau level

Provinsi bisa dilaksanakan di pertengahan tahun untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian di akhir tahun bisa dilaksanakan pemilu serentak lokal di level kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kab/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota.

Pemilu serentak model tiga skala ini, menurut penulis akan lebih efektif dan efisien dari pada Pemilu serentak yang diterapkan pada 2019 dan 2024 lalu, Pertama: proses demokrasi akan lebih optimal karena kampanye bisa berjalan lebih serius, tidak menumpuk dalam satu kurun waktu. Kedua, beban kerja petugas penyelenggara dari PPK, PPS, hingga KPPS menjadi lebih ringan. Ketiga, masyarakat lebih mudah menentukan pilihannya. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan lebih optimal dan substantif, ketika semua elemennya, seperti partai politik dan penyelenggara pemilu hingga rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan tertinggi negara turut berkontribusi dengan baik melalui mekanisme Pemilu yang mudah, nyaman dan tidak *ribet*. (\*)-d

**\*)Atmaja Wijaya, Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM.**

## Pojok KR

Tersangka judul ditangkap di Yogya, aset Rp 16 miliar disita.

**- Dikiranya Yogya tempat aman untuk pelarian.**

\*\*\*

Gubernur DIY panggil Pj Walikota Yogya soal sampah.

**- Menteri LHK jangan hanya marah-marah.**

\*\*\*

Indonesia lepas dari juru kunci usai bungkam Arab Saudi.

**- Apresiasi untuk Tim Garuda.**